



Media Title	Republika		
Head Line	Proyek JTTS Butuh Perpres		
Date	18 Des 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	7	Article Size	
Journalist	Muhammad hafil	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Proyek JTTS Butuh Perpres

Proyek tol ini diharapkan punya nilai ekonomis untuk menarik investor.

PEKANBARU — Sejumlah kepala daerah meminta adanya payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) untuk mempercepat pelaksanaan proyek Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS). "Payung hukumnya kita coba desak berupa Perpres, bagaimana bisa wujudkan jalan tol yang melintasi Pulau Sumatra," kata Penjabat Gubernur Riau Djohermansyah Djohan, seperti dikutip Antara pada pembukaan Rakor Tindak Lanjut Pertemuan Gubernur se-Sumatra dalam Percepatan Jalan Tol Sumatra di Pekanbaru, Selasa (17/12).

Djohermansyah yang juga dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menilai, perpres khusus mengenai proyek tol Sumatra diharapkan bisa menjadi terobosan untuk jalan keluar sejumlah kendala proyek itu. Kendala realisasi proyek tersebut cukup banyak hampir sama di setiap daerah.

Di antaranya, masalah pembebasan lahan masyarakat, keikutsertaan BUMN atau BUMD, pembiayaan dari masing-masing pemda, hingga pelepasan kawasan hutan atau perkebunan. Dengan adanya payung hukum yang pasti, proyek tersebut baru jelas terlihat nilai ekonomisnya untuk menarik investor agar menanamkan modal di proyek tol Sumatra. "Proyek tol ini harus punya nilai ekonomis karena investor kalau rugi nantinya mana ada yang mau," katanya.

Menurut dia, proyek JTTS memiliki nilai ekonomis sebagai akses transportasi untuk mengangkut hasil sumber daya alam, di antaranya, kelapa sawit dan batubara. Sedangkan, nilai strategisnya, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi di tiap daerah yang bakal dilewatinya, mengurangi biaya transportasi, dan sebagai stimulan pertumbuhan sektor industri, turisme, dan lapangan kerja.

Payung hukum berupa perpres di-

harapkan bisa memastikan porsi pembiayaan. Misalkan, pembiayaan dari pemerintah pusat lewat APBN sebesar 49 persen dan sisa 51 persen bisa dibagi lewat penyertaan modal pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, BUMN, BUMD, hingga investor asing.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menilai, payung hukum berupa perpres untuk pelibatan BUMN dalam proyek tol harus mengedepankan aspek hukum. Artinya, pelibatan BUMN nantinya dilakukan lewat tender terbuka.

Genjot pariwisata

Pembangunan JTTS dinilai bisa menggenjot sektor pariwisata di Pulau Sumatra. Menurut Ketua Program Studi Pariwisata Universitas Indonesia Jajang Gunawijaya, jika JTTS diwujudkan, wisatawan yang mengunjungi objek wisata yang ada di Pulau Jawa dapat melanjutkan petualangannya langsung ke Sumatra lewat jalur darat yang lebih eksotik dan menantang dibandingkan lewat udara. "Demikian halnya wisatawan luar negeri yang singgah di Singapura lewat Batam, dapat terus menikmati keberagaman hayati dan aneka budaya serta kearifan lokal yang dimiliki Sumatra," ujar Jajang.

■ ed: muhammad hafil

Data dan Fakta JTTS

- JTTS yang posisinya berada di pantai timur Sumatra memiliki panjang 2.017 kilometer
- JTTS menghubungkan delapan kota besar dari Lampung hingga Aceh
- Estimasi biaya pembebasan lahan Rp 9 triliun
- Estimasi biaya konstruksi Rp 77,8 triliun
- Estimasi biaya investasi Rp 136,8 triliun
- Dalam jangka panjang, JTTS terkoneksi dengan jembatan Selat Sunda dan jalan tol Trans-Jawa

Sumber: Rakor Gubernur se-Sumatera